



**P E N E T A P A N**

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Nama : **Pemohon**  
Tempat, Tanggal Lahir : Arasoe, 05 Mei 1981 (39 Tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : BTN Nindya Residence 3 Blok D No. 4 RW.  
004 RT. 003 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Nama : **AHMAD NUR, S.H.**  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Daya Raya, Perumahan Graha Cendekia Blok B/ 5,  
Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota  
Makassar.

2. Nama : **MUHAMMAD ALAM NUR, S.H., M.Kn.**  
Umur : 40 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin, Griya Matahari Permai Blok B/  
22, Sanrangang, Kabupaten Pangkep.

Keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum MUHAMMAD ALAM NUR, AHMAD NUR & REKAN, beralamat di Jl. Daya Raya, Graha Cendekia Blok B/ 5, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Telp. 082291594959/ 082332099222. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 14 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm, tanggal 14 Mei 2020 mengajukan permohonan Izin Poligami dan Isbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDIN DG. MATTIRO Als. IRWAN) telah menikah dengan Pr. ANASTASYA ANGEL TAS'AN BINTI AMBRIN TAS'AN pada tanggal 1 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 469.01.VIII.2006 tertanggal 1 Agustus 2006;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDIN DG. MATTIRO Als. IRWAN) dengan Pr. ANASTASYA ANGEL TAS'AN BINTI AMBRIN TAS'AN tersebut kehidupan rumah tangga PEMOHON berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun 2017, Isteri PEMOHON yang bernama Pr. ANASTASYA ANGEL TAS'AN BINTI AMBRIN TAS'AN tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai Isteri yaitu tidak dapat memberikan nafkah batin dengan baik kepada PEMOHON sesuai kebutuhan sebagai seorang Suami;
3. Bahwa oleh karena Isteri Pr. ANASTASYA ANGEL TAS'AN BINTI AMBRIN TAS'AN tersebut tidak dapat lagi memberikan nafkah batin, dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Isteri, maka untuk menghindari terjadinya perzinahan maka PEMOHON melakukan nikah di bawah tangan (*nikah sirri*) di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 dengan seorang janda (cerai hidup) yang bernama Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN;
4. Bahwa atas permintaan PEMOHON kepada Isteri PEMOHON yang bernama Pr. ANASTASYA ANGEL TAS'AN BINTI AMBRIN TAS'AN untuk menikah kedua kalinya atas dasar kebutuhan nafkah batin PEMOHON, maka Isteri PEMOHON yang bernama Pr. ANASTASYA ANGEL TAS'AN BINTI AMBRIN TAS'AN tersebut, memberi persetujuan kepada PEMOHON untuk menikah dan/ atau mengesahkan/ mendaftarkan pernikahan yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 20 Maret 2020;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh Isteri Pemohon untuk menikah dan/ atau mengesahkan/ mendaftarkan pernikahan antara PEMOHON dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2018 tersebut, dan untuk kebutuhan mengenai status anak yang lahir dari pernikahan antara PEMOHON dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN, serta menyangkut kewarisan (Pewaris dan Ahli Waris), maka beralasan dan berdasar hukum, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan memberi izin kepada PEMOHON atas pernikahan PEMOHON dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN, dan mengesahkan pernikahan PEMOHON a quo, serta mengirimkan salinan putusan/ penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk diterbitkan Akta Nikah/ Kutipan Akta Nikah kepada PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDINDG. MATTIRO Als. IRWAN) dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa berkenan memutuskan/ menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDIN DG. MATTIRO Als. IRWAN) telah melakukan pernikahan di bawah tangan (*nikahsirri*) dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN pada tanggal 14 Desember 2018;
3. Menyatakan dan menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDIN DG. MATTIRO Als. IRWAN) untuk menikah (Pernikahan Kedua) dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN, dan mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDIN DG. MATTIRO Als. IRWAN) dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2018 tersebut;
4. Menyatakan/ menetapkan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan/ penetapan kepada Pegawai Pencatat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk menerbitkan Akta Nikah/ Salinan Akta Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan PEMOHON (IRWAN BIN BAHARUDDIN DG. MATTIRO Als. IRWAN) dengan Pr. JOANNA SHANTY BINTI MUHAMMAD JOHAN tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAN/ ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, mohon putusan/ penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya Majelis memeriksa identitas Pemohon dan ternyata Pemohon mengajukan Izin Poligami dikomulasi dengan isbat Nikah oleh karena waktu menikah masih terikat dengan perkawinan perempuan lain yang sampai sekarang belum pernah cerai secara resmi maka oleh karena itu Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon memperbaiki permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 195 /Pdt.P/2020/PA.Sgm.

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut masih dalam batas-batas yang dibolehkan undang-undang sebagaimana maksud Pasal 271 Rv, dan Termohon tidak keberatan dengan pencabutan tersebut maka majelis hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 195 /Pdt.P/2020/PA.Sgm dicabut.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminassa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan tanggal 18 Sawal 1441*Hijriyah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. HJ. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H** dan **Ruhana Faried, S.HI, M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rahmatiah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. Kasang. M.H**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

**Ruhana Faried, S.HI,M.HI**

Panitera Pengganti,

**Rahmatiah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	00,00
4. Biaya PNBP	Rp	00,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 195/Pdt.P/2020/PA.Sgm